

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemberian Grasi merupakan hak prerogatif Presiden kepada setiap warganya yang tersangkut kasus pidana, berupa pengampunan atau penghapusan pelaksanaan pidana itu sendiri dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Dengan diberikannya grasi dari Presiden Joko Widodo kepada terpidana kasus pembunuhan Direktur Utama PT. Putra Rajawali Banjarn, Antasari Azhar, pada 23 Januari 2017 lalu, menyulut pemberitaan di media nasional mengenai grasi yang diberikan tersebut, baik di media cetak, elektronik atau online. Salah satunya adalah surat kabar Harian Kompas.

Perjuangan Antasari dalam memperoleh hak pembebasannya tidak hanya ia lakukan sekali, terbukti dengan permohonan banding yang ia ajukan pada 17 Juni 2010 ditolak oleh Mahkamah Agung. Tak hanya sampai disitu, pada 06 September 2011, ia mengajukan Peninjauan Kembali (PK), dan Mahkamah Agung kembali menolak permohonan tersebut, pada 13 Februari 2012.

Tetapi, usaha Antasari menuai hasil setelah permohonan grasi yang ia ajukan pada 09 Mei 2015 lalu, dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Januari 2017.

Antasari merupakan mantan pejabat publik yang kontroversial, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Banyak kasus korupsi yang ia bongkar dimana banyak melibatkan para petinggi di pemerintahan dari daerah hingga nasional.

Salah satu kasus kontroversial yang ia berani ungkap adalah pada tahun 2007 ia mengungkap adanya dana aliran sebesar Rp. 100 Miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, dimana dalam kasus tersebut melibatkan mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI), Aulia Pohan, Aulia Pohan sendiri merupakan besan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono.

Tak lama setelah ditetapkannya Aulia Pohan sebagai tersangka kasus aliran dana YPPI, pada 29 Oktober 2008. Publik dibuat kaget, dengan munculnya pemberitaan bahwa Antasari ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen pada 04 Mei 2009. Tak hanya itu, ia pun dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Oktober 2009.

Terlebih lagi, pemberian grasi kepada Antasari Azhar oleh Presiden Joko Widodo, bertepatan dengan pesta demokrasi PILKADA ibu kota Jakarta, yakni pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 s.d 2022. Dimana dari kandidat calon Gubernur tersebut, merupakan anak kandung dari Mantan Presiden RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga

dengan diberikanya status bebas bersyarat oleh Presiden Joko Widodo, banyak yang mengkaitkan dengan mantan presiden RI ke-6 tersebut.

Atas pemberitaan mengenai bebasnya Antasari Azhar, sehingga menimbulkan pendapat umum di masyarakat, banyak yang pro dan begitupun dengan yang kontra.

Sehingga bisa dikatakan, berita dapat membentuk pendapat umum. Pendapat umum yang berkembang, dianggap penting bagi praktisi humas, karena salah satu fungsi humas adalah memantau pendapat umum.

“...dalam aktivitas, *public relations* yang menyangkut pendapat umum tersebut merupakan aspek yang penting untuk keberhasilan menciptakan opini publik positif, dan pada akhirnya akan tercipta suatu citra yang baik bagi lembaga atau organisasi yang menjadi tanggung jawabnya”. (Ardianto, 2008:127)

Pendapat umum dapat berpengaruh terhadap citra dan reputasi seseorang atau organisasi. Sehingga, pendapat umum yang berkembang tidak lepas dari peran komunikasi massa. Karena, masalah yang dianggap sepele bisa cepat berkembang menjadi pendapat umum karena diberitakan di media massa.

Media massa satu sama lain akan mengekspos “objek” yang dijadikan isu sampai isu tersebut mempengaruhi pandangan atau persepsi masyarakat. Sehingga, media massa dianggap memiliki pengaruh kuat serta dianggap sebagai alat yang cukup baik untuk menyebarkan suatu isu, mengendalikan pendapat umum dan menggiringnya ke suatu kecenderungan masalah.

Surat Kabar Harian Kompas, merupakan media cetak nasional yang independen, seimbang dan kredibel dalam melakukan pemberitaan. Termasuk dalam membentuk pendapat umum baik yang pro dan kontra, terkait pemberitaan mengenai grasi Antasari Azhar.

Sebagai salah satu paragraf berita yang dimuat oleh Harian Kompas, sebagaimana penulis kutip berikut ini :

Pada edisi 10 November 2016 dengan judul “Grasi Tetap Ditunggu”.

“Antasari dinilai telah memenuhi syarat untuk menerima pembebasan bersyarat. Selama menjalani hukuman, Antasari berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar disiplin serta tata tertib. Selain itu, masa pidana yang dijalankannya telah mencapai dua pertiga hukuman yang dijatuhkan kepadanya.”

Pada pemberitaan edisi 15 Februari 2017, dengan judul “Antasari-SBY Saling Tudung”.

“Lebih lanjut, Antasari menjelaskan, dugaan keterlibatan SBY dalam kasusnya dimulai ketika Cikeas memerintahkan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada Maret 2009 untuk menemui Antasari di rumahnya. Dalam pertemuan itu, Hary, sesuai perintah Cikeas, diminta membujuk Antasari agar tak menahan Aulia Pohan, terpidana kasus korupsi aliran dana BI.”

“SBY menambahkan, tuduhan Antasari itu berkaitan erat dengan pencalonan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam Pilkada DKI Jakarta. Ia meyakini tuduhan itu ditujukan untuk menjatuhkan suara Agus.”

Pada pemberitaan edisi 16 Februari 2017, dengan judul “Istana: Grasi dari Presiden sudah melalui Prosedur yang Benar”.

“Grasi untuk Antasari, menurut Pratikno, sama dengan grasi yang diberikan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Jika Antasari melakukan langkah hukum ke polisi atau menyampaikan pernyataan tertentu, menurut Pratikno, hal itu urusan yang bersangkutan. “ Mari mengembalikan posisi grasi secara proporsional. Jangan semuanya diarahkan ke Istana Kepresidenan.” Katanya.”

Dari banyaknya pemberitaan yang muncul, maka penulis tertarik untuk mengetahui kecenderungan isu dan arah isu yang terkandung dalam setiap pemberitaan mengenai grasi Antasari Azhar yang dimuat oleh surat kabar Harian Kompas dengan batas periode November 2016 sampai dengan Mei 2017.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam setiap pemberitaan yang dibuat oleh media, isu yang akan ditonjolkan berkaitan dengan kebijakan redaksionalnya, sehingga ada trend isu yang ditonjolkan dan ada yang tidak ditonjolkan.

Hal ini berkaitan dengan surat kabar yang diteliti oleh penulis, yakni surat kabar Harian Kompas. Surat Kabar Harian Kompas, merupakan media cetak nasional yang independen, seimbang dan kredibel dalam melakukan pemberitaan.

Berkaitan dengan hal diatas, maka penulis ingin melihat bagaimanakah kecenderungan (*Trend*) serta arah pemberitaan dari surat kabar Harian Kompas dalam menyajikan pemberitaan dari pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo kepada Antasari Azhar, yang menjadi kontroversi hingga kini di kalangan publik.

Pada hakikatnya, suatu pemberitaan oleh media massa harus berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip pemberitaan dalam Kode Etik Jurnalistik.

Netralitas dan Independen merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh para media massa, terhadap setiap pemberitaan yang mereka sajikan ke ranah publik. Karena, tujuan utama dari jurnalisme adalah menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat.

Berkaitan dengan pemberitaan mengenai proses permohonan hingga dikabulkannya Grasi Antasari Azhar oleh Presiden Joko Widodo, terhitung 10 November 2016 sampai dengan 18 Mei 2017, penulis memutuskan untuk menggunakan media massa surat kabar Harian Kompas setiap edisi yang terbit dari hari Senin sampai dengan Minggu, dimulai dari tanggal 10 November 2016, saat Antasari dan Tim Kuasa Hukumnya melakukan permohonan Grasi kepada Presiden Joko Widodo, hingga dikabulkannya permohonan Grasi tersebut oleh Presiden Joko Widodo kepada Antasari Azhar dan berakhir pada 18 Mei 2017.

Untuk itu penulis mengambil, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

**“ Bagaimana Trend dan Arah Isu Pemberitaan Grasi Antasari Azhar yang Dimuat Harian Kompas Periode November 2016 - Mei 2017? ”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi Trend isu dalam pemberitaan mengenai Grasi Antasari Azhar yang dimuat di Surat Kabar Harian Kompas selama periode November 2016 sampai dengan Mei 2017.

2. Mengidentifikasi Arah isu dalam pemberitaan mengenai Grasi Antasari Azhar yang dimuat di Surat Kabar Harian Kompas selama periode November 2016 sampai dengan Mei 2017.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan dalam penerapan ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian akademik analisis teks media.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi Trend dan Arah isu mengenai pemberitaan Grasi Antasari Azhar di ketiga media cetak nasional.
- b. Memberikan pengetahuan bahwa media massa masih memiliki kekuatan tersendiri dalam menggiring opini publik terhadap suatu isu.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian memberikan gambaran mengenai rencana susunan bab demi bab yang akan diuraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penelitian akan mencakup lima bab dengan uraian sebagai berikut:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari uraian konsep dan teori yang relevan dengan penelitian serta dilengkapi dengan operasionalisasi variabel dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Terdiri dari desain penelitian, sumber data, bahan penelitian dan unit analisis, teknik pengumpulan data dan teknik teknik analisis data.

#### **BAB IV          HASIL PENELITIAN**

Terdiri dari subjek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan pada bab I.

#### **BAB V           PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan yang berisi uraian singkat permasalahan yang diangkat, teori yang digunakan dan gambaran kesimpulan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Bab ini juga berisi mengenai saran tentang solusi konseptual untuk perkembangan teori secara hipotesis dan atau solusi praktis untuk praktik di lapangan.